

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19
DI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG**

Ika Agustina, Asep Hendra
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ikaagustina1875@gmail.com

Abstract

*IMPLEMENTATION OF THE DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT) POLICY FOR COVID-19 AFFECTED
COMMUNITIES IN BANDUNG REGENCY*

The purpose of this study is, where researchers want to know the extent of the implementation of providing Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa), for Communities affected by COVID-19 in Cileunyi District, Bandung Regency. This study uses qualitative methods with descriptive analysis, using qualitative methods, researchers want to know in depth the implementation of the policy of providing direct cash assistance for people affected by COVID-19, and describe the results of this study clearly, with data sources obtained from secondary data and primary data. , secondary data was taken from documentation, literature books related to BLT Village Funds, and scientific journals that raised the issue of BLT Dana Desa, as well as primary data obtained, from field observations, through interviews with related parties and affected communities. COVID-19. The results and conclusions, that the implementation of the policy of providing BLT Village Funds is carried out by the ranks of the District apparatus, the Village Board and the Village BPD, together with appointed officers from the RW/RT, the implementation is running smoothly without any significant obstacles, there are several citizens of the community who should be entitled to n, but cannot, this is because the name in question is not listed in the list of recipients of the Village Fund BLT. The Village Apparatus will immediately correct the existing data by adjusting the data and sending it to the relevant parties. The distribution of the Village Fund BLT is carried out while maintaining strict health protocols. Supervision is carried out by the TNI, POLRI and SATPOL PP.

Keywords: Policy Implementation, BLT, Village Fund, COVID-19

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah, dimana peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasinya pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), bagi Masyarakat terdampak COVID-19 di

Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti ingin mengetahui secara mendalam dari implementasi kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat terdampak COVID-19, dan mendeskripsikan hasil penelitian ini secara jelas, dengan sumber data didapat dari data sekunder dan data primer, data sekunder diambil dari dokumentasi-dokumentasi, buku-buku literature terkait BLT Dana Desa, dan jurnal- jurnal ilmiah yang mengangkat masalah BLT Dana Desa, serta data primer didapat, dari hasil observasi di lapangan, melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan Masyarakat terdampak COVID-19. Hasil dan simpulan, bahwa implementasi kebijakan pemberian BLT Dana Desa dilakukan oleh jajaran aparatur Kecamatan, Jajaran Desa dan BPD Desa, bersama-sama dengan petugas yang ditunjuk dari RW/ RT, pelaksanaannya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti, ada beberapa warga Masyarakat yang harusnya berhak mendapatkan, tetapi tidak dapat, hal ini dikarenakan nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar penerima BLT Dana Desa. Jajaran Aparatur Desa, akan segera memperbaiki data- data yang sudah ada dengan melakukan penyesuaian data dan dikirimkan kepada pihak-pihak terkait. Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan dengan tetap menjaga protocol kesehatan secara ketat. Pengawasan dilakukan oleh pihak TNI, POLRI dan SATPOL PP.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BLT, Dana Desa, COVID-19

PENDAHULUAN

Diberlakukannya pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana pemerintah membatasi akses masyarakat mulai dari mobilitas masyarakat sampai dengan aktivitas kegiatan ekonominya. Dampak ini betul- betul sangat memukul masyarakat, karena ekonomi masyarakat dengan pembatasan kegiatan ini secara otomatis akan mengalami kontraksi yang sangat dalam dimana masyarakat kehilangan penghasilannya dalam keseharian, dikarenakan mereka tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah, bahkan adanya masyarakat yang di PHK dari pekerjaannya, akibat banyak para usahawan yang gulung tikar, tidak dapat melanjutkan bentuk usahanya, sehingga mereka terpaksa untuk mem-PHK karyawannya, karena sudah tidak dapat membayar gaji mereka. Masyarakat akibatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Penerapan kebijakan PSBB tersebut mengakibatkan masyarakat tidak banyak memiliki pilihan lain, terkecuali untuk tetap tinggal di dalam rumah sebagaimana telah diinstruksikan oleh pemerintah, dampak COVID-19 tersebut apabila dilihat dari perspektif mobilitas antara kota dengan desa maka dapat dikatakan bahwa masyarakat yang ada di perkotaan jauh lebih terdampak dibandingkan dengan masyarakat yang ada di perdesaan, hal ini didasarkan kepada realitas bahwa selama ini mobilitas penduduk yang ada atau tinggal di perkotaan jauh lebih tinggi dibanding dengan mobilitas penduduk yang ada di perdesaan (Purnomo, 2009).

Khususnya untuk wilayah Jawa dan Bali, masyarakat kota lebih banyak yang terinfeksi, jika dibandingkan dengan masyarakat pedesaan, hal ini dikarenakan mobilitas dan aktivitas masyarakat kota sangat dinamis dibandingkan masyarakat desa. (Halim, Yahya and Nugraheny,

2020). Masyarakat yang berada pada zona merah COVID-19, lebih mudah terinfeksi, wilayah Jawa dan Bali termasuk wilayah zona merah COVID-19, ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. (Sumber: Gugus Tugas Penanganan COVID-19). Desa kita ketahui merupakan pemasok kebutuhan ekonomi masyarakat perkotaan, dimana produksi-produksi yang dihasilkan dari pedesaan dibutuhkan bagi masyarakat perkotaan. Misalnya produksi pertanian, perkebunan dan perikanan. Serta Desa merupakan pendorong perekonomian yang ada di kota, seperti penyediaan kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan akan sayur mayur, semua diproduksi di pedesaan. Adanya pembatasan akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar, sangat berdampak kepada adanya penurunan penghasilan masyarakat pedesaan. Khususnya yang bergerak pada bidang penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat kota (Hariyanto, 2014). Masyarakat pedesaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, selama ini sangat tergantung kepada sektor informal, serta tidak sedikit masyarakat desa memiliki mata pencahariannya sebagai buruh tani, buruh serabutan, mereka sebahagian besar tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tetap, mereka sangat bergantung hidupnya atas apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Sehingga tidak jarang dari mereka merupakan masyarakat miskin dan tidak memiliki penghasilan tetap.” (Taufik, 2017), apalagi adanya COVID-19 ini, banyak dari mereka mengalami penurunan penghasilan akibat kehilangan pekerjaannya.

Untuk itu harus hadir dan memberikan bantuan dalam mengatasinya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah ini, adalah dengan memberikan Bantuan Layanan Tunai Dana Desa, dimana kebijakan alokasi dana desa, semasa adanya COVID-19, sebahagian dialokasi untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Dan merupakan dana stimulus yang dapat diberikan oleh pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa banyak masyarakat yang tidak mampu memiliki daya belinya. Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Layanan Tunai Bagi Masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Cileunyi.” Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sumber dananya dari APBDesa dan bersumber dari Dana Desa. Dasar pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta melalui Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa. Tujuan dari pemberian BLT ini dikandung maksud adalah untuk dapat meringankan beban Masyarakat yang terdampak COVID-19.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian lain mengenai kebijakan publik diutarakan oleh Carl Friedrich (Winarno, 2008) yang mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai arah tindakan yang digagas atau diusulkan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang dapat memberikan hambatan dan peluang dalam kebijakan yang diusulkan guna memberikan suatu solusi dalam rangka untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Secara umum proses kebijakan publik terdiri dari proses penyusunan kebijakan publik atau disebut formulasi, proses pelaksanaan kebijakan publik atau disebut implementasi dan proses penilaian kebijakan publik atau evaluasi (Akib, 2010).

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2004, yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan yaitu sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang diarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah disusun sebelumnya. "Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan yang dinamis yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana yang diutarakan oleh (Leo Agustino)". Sedangkan Grindle dan Tangkilisan (2003), menjelaskan bahwa kebijakan publik berdasarkan kepada kedua ahli tersebut pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok secara terencana guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang mendorong maupun faktor yang menghambat. Dan lebih lanjut Grindle (1980) mengemukakan bahwa setidaknya terdapat dua faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu faktor substansi kebijakan (*content of policy*) dan faktor lingkungan kebijakan (*context of policy*).

Berdasarkan kepada pemahaman tersebut, secara jelas implementasi kebijakan memiliki peluang untuk berhasil maupun untuk gagal yang didasarkan kepada berbagai faktor sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tersebut di atas. Dalam konteks penanggulangan COVID-19, instrument kebijakan publik yang ditujukan dalam rangka menanggulangi baik secara langsung maupun tidak langsung atas penyebaran COVID-19. Adapun program bantuan sosial ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dengan adanya COVID-19, khususnya sector sosial dan ekonomi masyarakat. (Center for Tropical Medicine UGM, 2020; Sekretariat Kabinet, 2020).

METODE

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis deskriptif, sumber data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta data dari kajian pustaka, dokumentasi-dokumentasi terkait dengan permasalahan kebijakan BLT yang bersumber dari Dana Desa. Di Kabupaten Bandung. Beberapa permasalahan muncul di saat dilakukan distribusi penyaluran BLT, di 3 desa, yaitu Desa Cileunyi Wetan, Desa Cileunyi Kulon, dan Desa Cinunuk. Peneliti menggunakan metode kualitatif

deskriptif, dikarenakan penelitian dengan metode kualitatif, merupakan penelitian yang bersifat adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Dari suatu obyek penelitian, dengan tidak bergantung kepada pengukuran numerik. Dengan pendekatan dan analisis deskriptif, dimana peneliti menginginkan menjelaskan secara terinci dan mendalam atas apa-apa yang didapat melalui data sekunder dan data primer, sehingga hasil penelitiannya dapat dipercaya sesuai dengan apa yang dijumpai terjadi di lapangan.

Penelitian dengan analisis deskriptif merupakan jenis penelitian yang menguraikan berbagai permasalahan yang tengah diteliti dalam bentuk pengungkapan secara deskripsi, sejalan dengan pemahaman para ahli seperti apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010) dan Garna (1999) yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menguraikan permasalahan yang tengah diteliti dalam bentuk pengungkapan kata-kata secara naratif dan bukan dalam bentuk uraian hasil perhitungan statistik. Sumber data terdiri dari 2 (dua) yaitu: Pertama, sumber data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa tahap pertama di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Kedua, data sekunder yang mana digunakan berbagai sumber referensi yang relevan seperti dari buku, jurnal peraturan perundang-undangan dan lainnya yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu BLT Dana Desa yang tengah dilaksanakan saat ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan Creswell (2007) yang mana keseluruhan data yang diperoleh disajikan secara keseluruhan untuk kemudian dipilah menjadi bagian-bagian data yang disesuaikan dengan penyajian analisis, bagian data dari tiap bagian-bagian analisis diuraikan dan diinterpretasikan untuk kemudian diambil intisari dari tiap bagian analisis tersebut yang membentuk kesimpulan yang menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN (12pt)

Kecamatan Cileunyi

Kecamatan Cileunyi adalah salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung yang berada di kawasan Bandung Timur dan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Ujungberung, yang berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 1989 dilaksanakan peresmian gedung kantor Kecamatan Cileunyi yang merupakan pusat pemerintahan yang berlokasi di Jalan Raya Percobaan Nomor 39 Cileunyi. Kecamatan Cileunyi

merupakan wilayah simpul atau penyangga yang menghubungkan Jawa Barat wilayah Barat dengan Jawa Barat wilayah Timur yang diapit oleh dua pusat pertumbuhan kota dan Kabupaten yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Kecamatan juga merupakan kawasan pemukiman dan perdagangan/jasa serta kawasan industri.

Kecamatan Cileunyi memiliki wilayah 6 (enam) desa yang meliputi:

- a) Desa Cileunyi Wetan;
- b) Desa Cileunyi Kulon;
- c) Desa Cinunuk;
- d) Desa Cimekar;
- e) Desa Cibiru Kaler; dan
- f) Desa Cibiru Kulon.

Di bawah ini tabel data demografi Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung:

Tabel 1. Data Demogra di Kec. Cileunyi

NO	DESA	PENDUDUK			RT	RW	DUSUN
		L	P	JMLH			
1.	Cileunyi wetan	16.598	15.947	37.545	121	23	5
2.	Cileunyi kulon	17.407	9.595	22.002	116	26	8
3.	CIMEKAR	17.887	17.679	35.566	175	32	6
4.	CINUNUK	24.622	24.593	49.215	195	29	6
5.	CIBIRU WETAN	7.963	7.847	15.810	85	19	5
6.	CIBIRU HILIR	7.998	7.702	15.700	79	17	4
	JUMLAH	87.475	83.363	170.838	771	146	34

Sumber: Profil Kecamatan Cileunyi 2018.

Kecamatan Cileunyi berada pada posisi timur laut di wilayah Kabupaten Bandung berjarak 31 Km dari Ibu Kota Kabupaten, dan 18 Km dari Ibu Kota Propinsi Jawa Barat. Berada pada ketinggian 500 - 1500 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara berkisar antara 18 derajat celcius sampai dengan 25 derajat celcius.

Batas Wilayah:

- a) Timur: Kecamatan Cikeruh Kabupaten Sumedang;
- b) Utara: Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.
- c) Barat : Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung.
- d) Selatan: Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Berada pada jalur pertemuan (simpul) yang menghubungkan Jabar wilayah Barat dengan Jabar Wilayah Timur. Komposisi lahan yang ada yaitu 25% perumahan; 57% perkebunan dan pertanian, 7% prasarana jalan dan jembatan, 8% usaha, perkantoran dan industri. Kecamatan

Cileunyi memiliki luas wilayah kurang lebih 2.835.146 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 170.838 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 87.475 jiwa dan perempuan sebanyak 83.363 jiwa. Dan jumlah KK sebanyak 48.945.

Bahasan

Isu dalam Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa Isu dalam konteks kebijakan publik tidak memiliki artian sebagai “kabar burung” yang selama ini dikenal secara luas, melainkan kepada sebagai masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga isu dalam konteks ini dapat dipersamakan sebagai masalah kebijakan atau policy problem, menurut Wahab (2004) masalah kebijakan muncul dari adanya kesenjangan suatu kebijakan yang harus dicarikan solusinya. Isu publik dikaitkan dengan BLT Dana Desa diartikan sebagai kesenjangan antara substansi kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan realita yang ada di masyarakat, dengan begitu maka isu BLT Dana Desa menyangkut bagaimana proses implementasi kebijakan BLT Dana Desa direspons oleh masyarakat atau dalam konteks kebijakan publik disebut sebagai implementasi kebijakan (Tachjan, 2008; Akib, 2010) yang mana dalam realitasnya berupa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa. Pemahaman tersebut sejalan dengan berbagai pendapat dari para ahli, diantaranya dari Grindle (1980) dan Tangkilisan (2003) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik pada dasarnya akan selalu dihadapkan kepada 2 (dua) faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat yang mana pada akhirnya kedua faktor tersebut akan menentukan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan. Lebih lanjut Grindle (1980) mengemukakan bahwa setidaknya terdapat dua faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu faktor substansi kebijakan (*content of policy*) dan faktor lingkungan kebijakan (*context of policy*).

Dampak COVID-19 di Tingkat Desa Penyebarannya di Indonesia telah menyebar ke desa-desa dan memberikan dampak negatif khususnya bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang selama ini dilaksanakan di lingkungan perdesaan. Baik pemerintah desa maupun masyarakat desa menghadapi masalah akan dampak COVID-19 yang secara langsung berpengaruh secara buruk terhadap kegiatan dari masing-masing pihak, sehingga aktivitas yang dilaksanakan menjadi terbatas apabila dibandingkan dengan sebelum adanya penyebaran COVID-19. Bidang pemerintahan tidak terlepas dari posisi pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terbawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Fungsi pemerintahan tersebut setidaknya terdiri dari empat yaitu aspek pemerintahan, aspek pembangunan, aspek pemberdayaan dan aspek pembinaan (Kushandajani, 2015). Sedangkan bidang kemasyarakatan terkait langsung dengan aktivitas dan hubungan sosial masyarakat.

Beberapa dampak COVID-19, terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, penyelenggaraan pemerintah tetap berjalan namun tidak seperti biasanya di kala kondisi normal, dimana sektor pelayanan harus tetap menjalankan protokol kesehatan, salah satunya di dalam bertatap muka harus menjaga jarak aman, memakai masker, dan Masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus dicek kondisi suhu tubuhnya, sebelum masuk ruang perkantoran untuk menemui petugas atau pejabat yang memberikan pelayanan. Bahkan saat ini banyak sektor pelayanan dilakukan secara daring dengan aplikasi on line dari rumahnya masing-masing, ini dilakukan untuk mencegah adanya penularan semakin massif di wilayah Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Cileunyi, yaitu di desa-desa di wilayah Kecamatan Cileunyi. Bentuk pelayanan tidak lagi dapat berkumpul di satu tempat di ruangan kantor desa, protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat dan disiplin. Fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang lainnya mengalami hal yang sama sebagai dampak dari adanya penyebaran COVID-19. Meskipun demikian bagi desa-desa yang belum atau tidak terinfeksi COVID-19 di Kabupaten Bandung tetap menyelenggarakan fungsi pemerintahan seperti biasanya dengan menekankan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Kedua, aspek pembangunan desa. Pembangunan desa menjadi salah satu aspek yang terdampak COVID-19 yang mana berbagai program pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi di masa COVID-19, pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bandung harus meninjau ulang dan menyusun kembali program pembangunan desa baik yang bersifat pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik yang telah direncanakan dalam tahun anggaran sebelumnya untuk kemudian mengakomodasi adanya program penanggulangan COVID-19.

Padahal proses perubahan program pembangunan tersebut menjadi tidak mudah mengingat proses penyusunan pembangunan merupakan proses panjang yang dimulai dari tahap musyawarah dusun hingga kepada tahap musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Desa yang menghadirkan para pemangku kepentingan di tingkat desa (Djohani, 2008). Proses pemberdayaan masyarakat yang selamainidilaksanakan di desa yang ada di Kabupaten Bandung lebih kepada proses pemberdayaan secara langsung yang menghadirkan masyarakat dalam jumlah yang besar, kondisi adanya penyebaran COVID-19 yang melarang masyarakat untuk berkumpul dalam jumlah yang banyak menyulitkan terselenggaranya proses pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa mengupayakan proses pemberdayaan masyarakat dalam kelompok yang lebih kecil, maupun secara virtual dengan segala keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang ada di desa.

Dampak yang bisa dirasakan terhadap bidang kemasyarakatan setidaknya terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesehatan masyarakat, aspek aktivitas (perekonomian) masyarakat dan aspek hubungan sosial masyarakat. Penjelasan mengenai ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, masalah kesehatan masyarakat, penyebaran COVID-19 telah membuka

pola pikir dan perilaku masyarakat desa, dan memberikan kesadaran masyarakat desa untuk menjaga pola hidup sehat, seperti rajin mencuci tangan, bersih lingkungan, masyarakat desa semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, agar mereka tidak mudah tertular virus corona atau penyakit sejenis lainnya. Adanya batasan sosial (*social distancing*) sebagai upaya penanggulangan COVID-19 memberi dampak langsung kepada aktivitas masyarakat desa yang ada di Kabupaten Bandung yang mana masyarakat tidak memiliki kebebasan secara normal untuk melakukan kegiatannya seperti berkebun dan bercocok tanam, warga masyarakat diharuskan menerapkan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 dalam melakukan aktivitasnya.

Adanya atasan aktivitas masyarakat yang ada di desa secara langsung berdampak kepada penurunan aktivitas perekonomian seperti adanya penurunan permintaan produk pertanian mengakibatkan warga masyarakat yang ada di desa menghentikan atau mengurangi aktivitas mereka yang pada akhirnya mengurangi pendapatan atau penghasilan masyarakat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa COVID-19 berdampak kepada kehidupan perekonomian masyarakat yang ada di desa mengingat selama ini masyarakat desa menjadi penghasil produk-produk pertanian, perkebunan dan perikanan untuk menyokong kebutuhan masyarakat yang ada di kota. Dampak lainnya adalah aspek hubungan sosial masyarakat. Pelaksanaan pendistribusian Bantuan Layanan Tunai (BLT) di wilayah Kecamatan Cileunyi, dilakukan oleh jajaran petugas, yang terdiri dari unsur pejabat kecamatan, unsur pejabat Desa, BPD Desa, dibantu petugas RW dan RT, serta diawasi dalam pelaksanaannya oleh aparat TNI, POLRI dan SATPOL PP. dalam implementasinya pendistribusian Bantuan Layanan Tunai (BLT) dapat berjalan dengan lancar dan baik, ada kendala yang timbul pada saat pendistribusian dapat diatasi oleh jajaran aparat Desa Kecamatan dan dibantu oleh aparat pengawasan dari TNI, POLRI dan STPOL PP. Adanya Masyarakat yang seharusnya dapat, menjadi tidak dapat dikarenakan namanya tidak ada dalam daftar warga yang mendapatkan bantuan BLT, pihak jajaran desa, langsung menanggapi, dan memperbaiki data yang belum sempurna, dan adanya nama orang yang sudah wafat, masih masuk, sehingga jatah yang bersangkutan langsung digeser kepada warga yang berhak, namun namanya belum terdaftar, data diperbaharui. Mekanisme dan cara yang dilakukan jajaran aparat Kecamatan, Desa dan dibantu pihak RW dan RT serta diawasi oleh jajaran TNI, POLRI dan SATPOL PP, sangat dirasakan efektif, dan warga Masyarakat merasa puas akan pelayanan yang diterimanya.

Untuk mewujudkan akuntabilitas penggunaan BLT Dana Desa, sebuah masukan yang dapat dipikirkan oleh pemangku kebijakan, apakah perlu dibuatkan Laporan pertanggungjawaban masyarakat mengenai penggunaan BLT Dana Desa di masa yang datang. Hal dimaksud adalah agar masyarakat ke depan juga harus diberikan tanggungjawab penggunaan

BLT Dana Desa, agar penggunaannya dapat digunakan tepat sasaran sesuai apa yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. BLT Dana Desa agar tidak disalahgunakan untuk pembelian atau pengadaan alat- alat semacam masker, disinfektan, dan lainnya sebagai upaya penanggulangan COVID-19, tetapi BLT Dana Desa sebagai upaya mengurangi dampak COVID-19 bagi Masyarakat, khususnya bagi Masyarakat kurang mampu agar dapat tetap menyelenggarakan keberlangsungan hidupnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada hasil bahasan, tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan jajaran aparatur pemerintah daerah di dalam mendistribusikan Bantuan Layanan Tunai (BLT) Dana Desa, di Kecamatan Cileunyi, khususnya di Desa-Desa di wilayah dalam Kecamatan Cileunyi dapat disimpulkan adanya faktor pendorong dan faktor penghambat, faktor pendorong adalah dampak adanya gerakan masyarakat, untuk dapat membantu warga masyarakat yang terdampak COVID-19, sehingga aparatur pemerintah daerah sebagai yang bertanggungjawab dalam pelayanan publik, merasa terdorong untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, dengan membuat sebuah perencanaan tentang BLT, yang didukung dari Dana Desa, dengan berbagai upaya, dan koordinasi dan mufakat dalam organisasi Pemerintahan desa, dan mendapat respon dan persetujuan dari level kecamatan dan Bupati Kepala Daerah, maka BLT Dana Desa dapat terwujud untuk dapat diberikan kepada warga terdampak COVID-19 di Kecamatan Cileunyi, khususnya di Desa-Desa dalam lingkungan Kecamatan Cileunyi. Faktor penghambatnya, adalah data yang didapat tentang warga yang terdampak secara akurat sulit didapat, karena beberapa oknum masyarakat yang ditugasi untuk mendata, memasukkan warga Masyarakat yang seharusnya tidak dapat BLT Dana Desa, karena kondisi mereka pada kondisi warga tergolong mampu. Dan masih adanya data orang yang sudah tidak ada (meninggal) masih dimasukkan sehingga disini pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab dalam pendistribusian BLT Dana Desa harus benar-benar jeli dan melakukan verifikasi secara detail, sehingga memakan waktu dalam implementasinya.

Dalam implementasinya pendistribusian BLT Dana Desa, berjalan dengan lancar dan baik, semua pihak mendukung pendistribusian BLT Dana Desa, data- data yang masih belum akurat, seiring dengan berjalannya pelaksanaan implementasi kebijakan, data dapat disempurnakan, dengan didukung data- data lainnya seperti KTP, dan Kartu Keluarga bagi masyarakat yang belum terdaftar, dan ditandatangani oleh pihak RT dan RW setempat, dengan saksi- saksi dari tetangga kanan-kirinya, ini berjalan dan dapat diterima oleh semua pihak, jadi pada intinya komunikasi yang selalu dijaga dengan baik kepada masyarakat maka akan mempermudah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan BLT Dana Desa. Di Desa-Desa dalam lingkungan Kecamatan Cileunyi. Terkait keterbatasan aparatur Desa, dalam pendistribusian BLT

Dana Desa, dapat diatasi oleh petugas atau pejabat dari jajaran petugas Kecamatan dan jajaran TNI.POLRI dan SATPOL PP. Semua bersinergis dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Untuk mewujudkan akuntabilitas penggunaan BLT Dana Desa, sebuah masukan yang dapat dipikirkan oleh pemangku kebijakan, apakah perlu dibuatkan Laporan pertanggungjawaban masyarakat mengenai penggunaan BLT Dana Desa di masa yang datang. Hal dimaksud adalah agar masyarakat ke depan juga harus diberikan tanggungjawab penggunaan BLT Dana Desa, agar penggunaannya dapat digunakan tepat sasaran sesuai apa yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. BLT Dana Desa agar tidak disalahgunakan untuk pembelian atau pengadaan alat- alat semacam masker, disinfektan, dan lainnya sebagai upaya penanggulangan COVID-19, tetapi BLT Dana Desa sebagai upaya mengurangi dampak COVID-19 bagi Masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu agar dapat tetap menyelenggarakan keberlangsungan hidupnya.

SARAN/REKOMENDASI

Saran yang dapat diajukan dalam artikel ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya konsistensi kebijakan dalam menyusun dan menetapkan masyarakat penerima BLT Dana Desa, agar tidak salah sasaran penerima bantuan berikutnya.
- 2) Perlu adanya upaya untuk membangun tanggung jawab masyarakat terhadap penggunaan BLT Dana Desa sebagaimana peruntukannya yang tidak hanya akan menumbuhkan sikap tanggung jawab masyarakat terhadap bantuan sosial yang telah diberikan, tetapi juga dapat menjadi input bagi perbaikan kebijakan serupa di masa yang akan datang.
- 3) Perlu adanya evaluasi terhadap revid data, bagi Masyarakat penerima BLT, setiap tahunnya, karena data harus dinamis sesuai dengan perubahan kehidupan ekonomi Masyarakat di desa-desa.
- 4) Perlu adanya verifikasi data secara akurat, sebelum dikirimkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas Bantuan Layanan Tunai Dana Desa (BLT) Dana Desa. Ke depan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada lagi ditemukan data yang salah dan kurang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

- Bantuan Langsung Tunai', *Jurnal Equilibrium*, III(2), pp. 126–135. Smeru Research Institute (2013)
- Dasar Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19, ombudsman. or.id.
- Dwipayana, A. A. G. and Eko, S. (2003) *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Dye, T. R. (2005) *Understanding Public Policy*.
- Halim, D., Yahya, A. N. and Nugraheny, D. E. (2020) Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus, *kompas.com*.
- Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman Offset. Taqwaddin (2020)
- Ketimpangan. "Handbook on Poverty and Inequality". Penerbit Salemba Empat untuk Bank Dunia. Jakarta.
- Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia. Jakarta. Sekretariat Kabinet (2020)
- Pemerintah Berikan Program Bantuan Tambahan Hadapi Pandemi Covid-19, Sekretariat Kabinet.
- Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia. Jakarta.
- Musiyad, Muhammad., Farid Wajdi. 2000., *Kerentanan dan Jaring Pengaman Sosial*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.
- Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Musiyad, Muhammad., Farid Wajdi. 2000., *Kerentanan dan Jaring Pengaman Sosial*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.
- Protes Belum Terima BLT Dana Desa, Warga: Uangnya Sudah Ada, Mengapa Disimpan?. *kompas.com*.
- Pengaruh Dinamika Sektor Pekerjaan Terhadap Dinamika Kemiskinan Perdesaan', *Socio-Konsepsia*, 7(1), pp. 2–14. Wahab, S. A. (2004)
- Rahmona, Reina. Ika Purwanti Ningrum & Natalis Ransi. 2016. *Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dengan Metode Analytical*
- Rustanto, Bambang., 2015., *Menangani Kemiskinan.*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sugiyono (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Research and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Sutikno. 2012 *Sistem Pendukung Keputusan Metode AHP Untuk Pemilihan Siswa Dalam Mengikuti Olimpiade Sains di Sekolah Menengah Atas*. FMIPA UNDIP.
- Sutikno, dkk. 2010. *Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan UMS*. Volume 11, Nomor 1, hlm 135-147.

Siswanti, Wahyu. 2008. *Dinamika Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Studi Kasus di Kabupaten Kebumen.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dasarhukum-penggunaan-dana-desa->

<https://dokumen.tips/documents/draft- bps-bab-2-kab-wonogiri.html> (diakses pada Minggu, 13 Mei 2018. Pukul 09.45 WIB)

Jurnal Administrasi Publik, 1(1), pp. 1–11. Ali, R. (2020) Wali Kota Bogor Curiga Dana Bantuan Pemerintah Digunakan Belanja Baju Lebaran, merdeka.com.

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Volume 12, Nomor 1 (Mei 2008). Hal 99-110. Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Jurnal Administrasi Publik, 1(1), pp. 1–11. Ali, R. (2020) Wali Kota Bogor Curiga Dana Bantuan Pemerintah ‘Bantuan Langsung Tunai’, *Jurnal Equilibrium*, III(2), pp. 126–135. Smeru Research Institute (2013)

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Volume 12, Nomor 1 (Mei 2008). Hal 99-110. Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Available at: <https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/blt.pdf>.

[https://covid19.go.id/edukasi/apa-yang-harus-kamu-ketahuitentang-covid-Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 \(2020b\) Peta Sebaran COVID-19. Jakarta.](https://covid19.go.id/edukasi/apa-yang-harus-kamu-ketahuitentang-covid-Gugus-Tugas-Percepatan-Penanganan-COVID-19-(2020b)-Peta-Sebaran-COVID-19.-Jakarta)

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dasarhukum-penggunaan-dana-desa-untuk-pencegahan-covid-19> (Accessed: 19 July 2020). Taris, N. (2020)

<https://regional.kompas.com/read/2020/05/21/18395811/protes-belum-terima-bltdana-desa-warga-uangnya-sudah-ada-mengapa-disimpan> (Accessed: 26 May 2020). Taufiq, N. (2017) ‘